



Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Nama : Ferdinand Arthuro Gorogutha

Nim : 151070204

Judul : *Financial Action Task Force* Sebagai *Global Policy Making Body* dan Implementasinya Dalam Memerangi *Money Laundering* di Indonesia (2001-2006).

(viii + 122 Halaman) + Daftar Pustaka : (15 Buku + 12 JuRNAL + 11 Laporan + 16 Internet + 3 Undang-Undang) .

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai dimasukkannya Indonesia kedalam daftar *Non-Cooperative Countries or Territories* pada tahun 2001 oleh *Financial Action Task Force* yang merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan pencucian uang. Dimasukkannya Indonesia kedalam daftar negara yang tidak kooperatif tersebut didasarkan atas belum adanya kesiapan Indonesia dalam memberantas pencucian uang secara langsung, walaupun Indonesia sudah punya beberapa langkah dalam mencegah terjadinya beberapa kejahatan asal yang akan bermuara pada kejahatan pencucian uang namun hal ini dilihat oleh *Financial Action Task Force* sebagai suatu langkah yang lambat dan tidak efektif dalam memberantas pencucian uang di Indonesia. *Financial Action Task Force* sebagai suatu organisasi yang sudah diakui kehadirannya telah membuat suatu rezim perlawanan terhadap pencucian uang yang berupa rekomendasi anti pencucian uang yang dapat diimplementasikan di setiap Negara termasuk di Indonesia. Keefektifan dari rekomendasi yang dibuat oleh *Financial Action Task Force* tersebut tidak dapat berjalan bila Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mempidanakan pencucian uang sebagai suatu syarat mutlak untuk mengkategorikan kejahatan tersebut merupakan suatu kejahatan pencucian uang , serta suatu badan yang bertugas sebagai penganalisis transaksi keuangan ,dan juga regulasi dalam jaringan sistem keuangan baik yang perbankan maupun non perbankan seperti regulasi akan adanya penerapan pengenalan nasabah.

Kata kunci: *Non-Cooperative Countries or Territories*, *Financial Action Task Force*, Indonesia, Rekomendasi anti pencucian uang.